

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping juga karena adanya pengaruh globalisasi. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Paradigma baru di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diarahkan oleh otonomi daerah menggeser peran pemerintah dari *power* kepada *empowerment*. Paradigma ini mengarahkan peran aparatur pemerintah kepada posisi yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat secara profesional.

Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pewujudan good government adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dimaksud adalah dalam konteks (1) kinerja sesuai dengan Tupoksi, dan (2) keuangan sesuai dengan dokumen anggaran yang telah disusun diawal tahun. Akuntabilitas pemerintahan yang dipercaya oleh publik dan stakeholder akan membangun pemerintah yang kuat dan berdaya saing tinggi. Pemerintahan yang kuat dan berdaya saing tinggi adalah kunci keberhasilan dalam persaingan dewasa ini.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Cidadap selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Cidadap sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Cidadap Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Kecamatan Cidadap

Kecamatan Cidadap Kota Bandung dari perspektif geografis merupakan bagian dari pusat perkotaan berada di sebelah Utara Kota Bandung dengan memiliki luas wilayah \pm 612.316 Ha, dengan batas wilayah meliputi :

- Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang Kab. Bandung Barat;
- Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukasari Kota Bandung;
- Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Coblong Kota Bandung;
- Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukasari dan Sukajadi Kota Bandung;

Batas wilayah dan jumlah kelurahan di Kecamatan Cidadap pertama kali ditetapkan berdasarkan pada PP Nomor 16 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Kecamatan Cidadap terdiri dari 3 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Hegarmanah.
2. Kelurahan Ciumbuleuit.
3. Kelurahan Ledeng.

Kecamatan Cidadap meliputi luas wilayah 612.316 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 52.148 jiwa, terdiri dari 26.921 laki-lak dan 25.227 Perempuan dan terdiri dari 12.374 Kepala Keluarga (KK). Untuk kepentingan administrasi kependudukan 3 (tiga) Kelurahan tersebut terdiri dari 29 Rukun Warga, dan 175 Rukun Tetangga. Sebagian besar wilayah Kecamatan Cidadap terdiri dari ruang terbuka hijau dan pemukiman. Sedangkan kegiatan ekonominya didominasi oleh sektor jasa.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 185 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.

Kecamatan Cidadap Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 1407 Tahun 2016 tentang (SOTK SKPD), Kecamatan Cidadap mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Cidadap mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- c. Mengkoordinasikan Penerapan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum
- e. Membina Pemerintahan Kelurahan diwilayah Kerjanya

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran kecamatan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
3. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
4. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
5. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
6. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan yang meliputi Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Kecamatan;

8. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Kecamatan;
9. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
10. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Kecamatan;
13. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan lingkup Kecamatan;
14. Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
15. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban serta upaya penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
16. Meningkatkan kualitas upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan;
17. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan;
18. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peran pembinaan kepemudaan;
19. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;

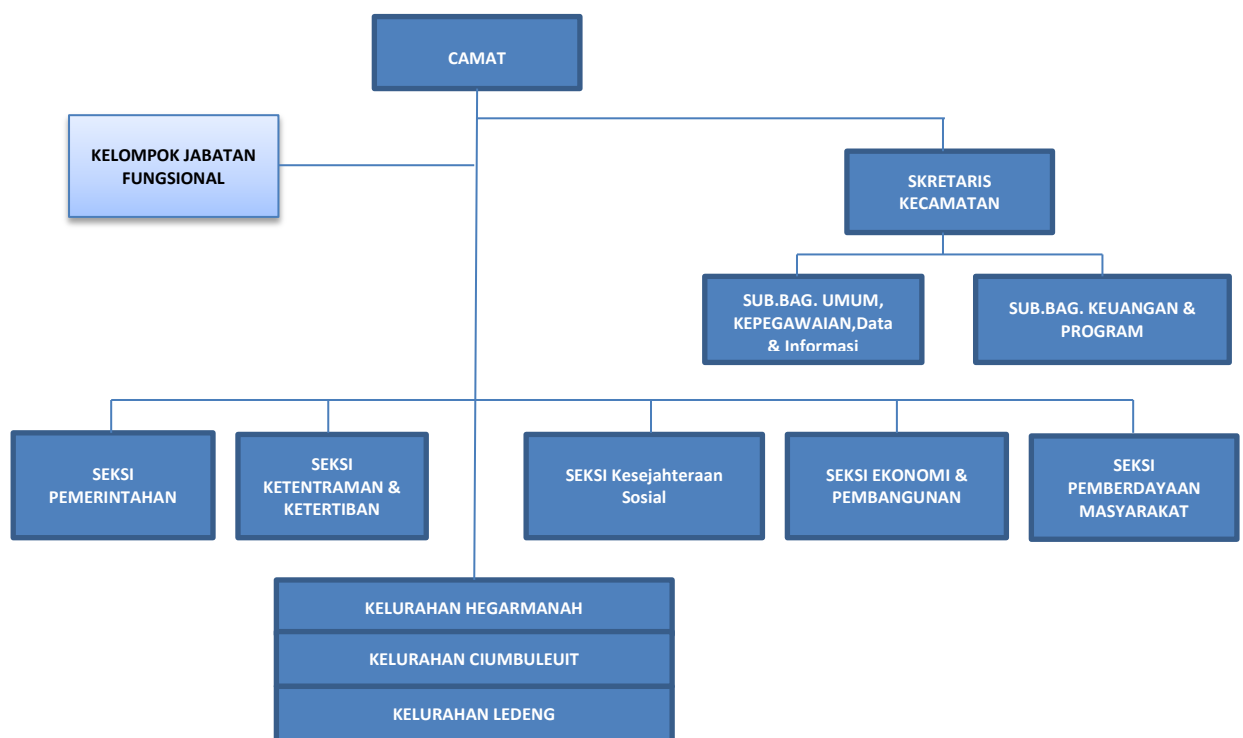
20. Melaksanakan pemeliharaan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kerjanya;
21. Menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
22. Melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan dan Pelayanan Administrasi Pertanahan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);
23. Melaksanakan kegiatan yang merupakan Kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada Kecamatan;
24. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
25. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
26. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kecamatan;
27. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan; dan
28. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Cidadap dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretaris Kecamatan, membawahi:
 - a. Sub bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi
 - b. Sub bagian Program dan Keuangan
2. Seksi-seksi sebagai unsur Lini terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Keamanan dan Ketertiban

- c. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Lurah, membawahi
- a. Sekretaris Kelurahan
 - b. Seksi Pemerintahan
 - c. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Gambar 1.1.
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



1.4 Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Cidadap Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Cidadap Kota Bandung pada tahun 2018-2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang harus disertai dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen bersama.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif agar tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan

SDM aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan membangun komitmen bersama untuk melaksanakan TUPOKSI dapat berdaya guna, berhasil guna untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cidadap Kota Bandung, sebagai berikut:

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Tingkat implementasi program dan kegiatan pada Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Cidadap dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

1. Kelurahan yang telah melaksanakan tertib administrasi Kelurahan sebesar 100 %;
2. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 70 %;
3. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
4. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Tingkat SKPD;

5. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008;
6. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
7. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
8. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Cidadap sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.

1.5. LANDASAN HUKUM

LKIP Kecamatan Cidadap Tahun 2020 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 – 2023.

1.6. SISTEMATIKA

Adapun Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2020 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Cidadap Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Cidadap Kota Bandung Nomor 050/107-Kec.Cddp Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Cidadap Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023. Penyusunan Renstra Kecamatan Cidadap Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Cidadap Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Cidadap Kota Bandung dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Cidadap Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cidadap Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Cidadap Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Misi Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Misi Tahap IV dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap IV tersebut. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan Iangkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : ***Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan Kota Bandung.*** Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri dari:

1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (*sustainable*) dan nyaman.

2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.
3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, Kecamatan Cidadap Kota Bandung sebagai unsur dari pemerintah Kota Bandung menentukan kualitas pelayanan publik Kota yang didukung oleh aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk :

1. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dengan tetap berpegang kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat;
2. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-standar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada akhirnya akan menghambat mekanisme penyelenggaraan pemerintahan;
3. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud.
4. Objektif, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan pelayanan didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan kebijakan dan keputusan pelayanan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan pelayanan secara parsial

sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan;

Dengan adanya sikap yang kreatif, konsistensi, loyalitas dan objektif dari seluruh aparatur yang ada di lingkungan Kecamatan Cidadap Kota Bandung diharapkan dapat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf dalam merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2019-2013 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Tabel 2.1

TUJUAN

Misi	Tujuan
1. Mewujudkan Pelayanan Publik	1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Membangun Sistem dan Budaya Pelayanan Publik

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 sebanyak 1 (Satu) sasaran strategis.

Tabel. 2.2

Sasaran

Sasaran dari tujuan 1
a. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja,

permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan review terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil review tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cidadap 2020.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Cidadap Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terlaksananya Pelayanan Publik yang prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80	80.5	81.21	82	84
2		Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	33.33	33.33	66.66	66.66	100
3	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	36.9	42.91	65.87	71.62	76.34

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan review Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung, yaitu :
 - Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing;
 - Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.
2. Rekomendasi Narsumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu :
 - Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan;
 - Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan;
 - Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya;
 - Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja;
 - Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja.

2.2. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cidadap ditetapkan melalui Keputusan Camat Cidadap Nomor : 050/09-Kec.Cddp Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kecamatan Cidadap Kota Bandung dan *Key Performance Indikator* Kepala Perangkat Daerah.

Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukkan ke Indikaotr Kinerja Utama antara lain : Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI, Rasio Anggota Linmas Aktif dan Nilai AKIP Kecamatan karena merupakan unsur penunjang dan merupakan tupoksi SKPD lain sehingga tidak masuk indikator kinerja utama di Kecamatan.

Tabel 2.4

Target Kinerja Kecamatan Cidadap Kota Bandung

Indikator	Target	Satuan	Keterangan
1	2	3	4
rata rata hasil survey IKM Kecamatan	80.5	Nilai	
Tingkat Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	65.87	%	
Persentase Kelurahan Unggul	66.66	%	

Uraian Indikator Utama Kecamatan beserta penjelasannya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Cidadap Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cidadap	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cidadap	Nilai	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tupokasi dan merupakan IKU dan PK Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey kepuasan Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	Merupakan PK dan Meminimalisasi temuan dalam rangka mewujudkan Bandung WTP	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti tepat	Sekretariat kec, BPK, Inspektorat	Tindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Merupakan PK Pelimpahan kewenangan dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul	Kelurahan	Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 13 jenis kondisi di bawah ini: 1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) - Ada kepengurusan - Ada program kerja - Mengikuti pelatihan - Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>pemadam kebakaran datang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat <p>2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Kepengurusan - Gardu Sosial - Lumbung sosial - Peta Rawan Bencana - Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana <p>3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung <p>4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah</p> <ul style="list-style-type: none"> - petunjuk arah ke masjid

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<ul style="list-style-type: none"> - ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/alarm waktu sholat 5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> - Data terpilah - satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) 7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi <p>8. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol <p>9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</p> <p>10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2020) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Koperasi \geq 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam 11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang) Kriteria: 1. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan 2. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan 3. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan 4. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblas 5. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering 6. Melakukan penyiraman pada

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>musim kemarau</p> <p>12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART <p>13. Siskamling RW Aktif</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	Merupakan IKU dan PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	Rata-rata % RW Unggul + % PKK Unggul + % Karang Taruna Unggul + % LPM Unggul	Kelurahan	% RW Unggul (Minimal memenuhi salah satu metode Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat dan 50 %

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
		Unggul					<p>Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung)</p> <p><i>Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga 2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah 3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R 4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester 5. Sosialisasi dan Pemanfaatan sampah menjadi berguna 6. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya <p>50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan</p>

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p><i>dibawah ini :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 2. Urban Farming 3. Koperasi RW Juara (Pembentukan satgas anti renternir) 4. Laporan RW tepat waktu minimal form A : <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Kependudukan (Format A1-A5) b. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C) c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni 5. Koperasi di Sarana ibadah <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Anggota b. Memiliki Kepengurusan c. Memiliki AD/ART

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>6. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sholat magrib dan atau shubuh berjamaah b. Kegiatan pengajian c. Mengaktifkan remaja masjid d. Masjid sebagai sarana berkumpul/silahturahmi <p>7. RW berdaya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ada kepengurusan b. Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf) c. Adanya kegiatan sosial/pembangunan di RW yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf) <p>8. Perpustakaan RW (Warga Gemar Membaca)</p> <p>9. 1 rumah 1 Kader Jumanti;</p> <p>10. Produk Unggulan berbasis Pemberdayaan Masyarakat</p>

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							11. Taman Tematik ramah disabilitas 12. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang; 13. 50 Penanaman Pohon 14. Sosialisasi Perencanaan Pemberdayaan; 15. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan; 16. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air; 17. Kelompok Lansia Sehat; 18. Posyandu Purnama; a. Kegiatan lebih dari 8 kali b. Kader lebih dari 5 orang c. Cakupan 5 kegiatan utama lebih dari 50 % : - KIA - KB - Imunisasi - Gizi - Pencegahan dan Penanggulangan Diare d. Ada Dana sehat

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							19. RW Siaga Bencana/RW Siaga; % PKK Unggul Kriteria PKK Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan PKK untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini : 1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup PKK 2. Melaksanakan Sosialisasi Tenologi Tepat Guna 3. Melaksanakan penyuluhan KangPisMan 4. Sosialisasi bina keluarga 5. Sosialisasi ketertiban lingkungan 6. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 7. Koperasi PKK 8. Gerakan kebersihan dan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>pemanfaatan sampah</p> <p>9. Pembinaan Posyandu</p> <hr/> <p>% Karang Taruna Unggul</p> <p>Kriteria Karang Taruna Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan Karang Taruna untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup Karang Taruna 2. Membentuk dan melaksanakan Kagana 3. Melakukan pelatihan UED SP 4. Melakukan sosialisasi TTG 5. Melakukan sosialisasi pengolahan sampah

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							6. Pendataan PMKS dan PSKS 7. Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan bencana 8. Event Olah raga 9. Pusat pelayanan dan kreatif remaja (co-working space Kelurahan)
							% LPM Unggul Kriteria LPM Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan LPM untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini : 1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup Karang Taruna 2. Melaksanakan pembinaan RW siaga

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							3. Melaksanakan BBGRM 4. Pendataan profil kelurahan 5. Sosialisasi perencanaan partisipasi pembangunan 6. Rembug warga kelurahan (Musrenbang tingkat kelurahan) 7. Sosialisasi Pemanfaatan teknologi tepat guna. 8. Pendataan partisipasi/swadaya masyarakat di lingkup RW

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

a. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

b. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan Cidadap terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Tahun 2020

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan Cidadap di lingkungan Pemerintah Kota Bandung terutama pada Perjanjian Kinerja antara lain dihapusnya Indikator Kinerja pada Sasaran kesatu yaitu *Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu*. Hal ini disebabkan Kota Bandung telah mendapat predikat WTP (Wajar tanpa Pengecualian), dapat diartikan bahwa Kota Bandung telah mencapai target sehingga indikator tersebut tidak diperlukan lagi.

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Tahun 2020 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Cidadap Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terlaksananya Pelayanan Publik yang	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80	80.5	81.21	82	84

	prima	terhadap Pelayanan Publik Kecamatan						
2		Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	33.33	33.33	66.66	66.66	100
3	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	36.9	42.91	65.87	71.62	76.34

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Perubahan
Kecamatan Cidadap Kota Bandung
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Regol	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Regol	80.5
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	66.66
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	65.87

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Kecamatan Cidadap Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Cidadap Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020 maupun Renja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020 maupun Renja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Cidadap Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Kecamatan Cidadap Kota Bandung Nomor : 050/03-Cddp /2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Cidadap Kota Bandung. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Cidadap Kota Bandung melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Cidadap Kota Bandung tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cidadap
Kota Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	AHIR RENSTRA	
						Target	Capaian
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Cidadap	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cidadap	80.5	84.16	104.54	84	100.19
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	66.66	66.66	100,00	100	66.66
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	65.67	68.48	103.98	76.34	98.70

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Rata-rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cidadap, dengan capaian kinerja triwulan 104.54 %, pada indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dengan capaian kinerja triwulan 103.98 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Kelurahan Unggul, dengan capaian kinerja triwulan 100 %.

3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020

Secara umum Kecamatan Cidadap Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Cidadap, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 3 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Cidadap Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Cidadap

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Cidadap	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cidadap	80.5	84.16	104.54
		Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	100	100	100,00
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	66.66	66.66	100,00
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	65.67	68.48	103.98

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	66.67 %
2	Sesuai Target	33.33 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Indikator Kinerja

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	3	2	66.67	1	33.33	0	0.00
	Jumlah	3	2	66.67	1	33.33	0	0.00

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Cidadap Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	3	
1	Melebihi/Melampaui Target	2	66.67 %
2	Sesuai Target	1	33.33 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan- perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Cidadap Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Cidadap

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019	Akhir Renstra Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian %		Target	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Rata rata hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	80.5	84.16	104.54	82.6	84	100.19

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Cidadap

a. Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Cidadap merupakan salah satu sasaran yang harus didcapai dalam rangka mendukung ketercapaian misi ke 2 RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. Pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas dan fungsi dari kecamatan dan dimana pengukuran indikator ini mengacu pada Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Kepuasan Masyarakat

b. Instrumen atau cara pengukuran Indikator

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menjelaskan definisi dan beberapa unsur penilaian SKM. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh

penyelenggara pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Indikator penilaian indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat (IKM) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dengan formulasi pengukuran dan pengolahan data berdasarkan :

- 1). Pengukuran Skala Likert
- 2). Pengolahan Data Survei
- 3). Laporan Hasil Penyusunan Indeks.

Instrumen Pengukurannya yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan masyarakat. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan 9 unsur sesuai dengan Peraturan diatas terhadap seluruh unit pelayanan yang ada di Kecamatan Cidadap, yang terdiri dari unsur-unsur :

1. Persyaratan Pelayanan
 2. Prosedur Pelayanan
 3. Waktu Pelayanan
 4. Biaya/Tarif
 5. Produk Layanan
 6. Kompetensi Pelaksana
 7. Perilaku Pelaksana
 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- Sarana dan Prasarana.

c. Kinerja nyata dengan Rencana

Pencapaian Kinerja Utama Tahun 2020 Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa

yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Cidadap Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Cidadap Nomor 050/03-Cidadap/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kecamatan Cidadap Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Cidadap Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Cidadap Kota Bandung Triwulan IV tahun 2020 menunjukkan hasil Laporan Capaian Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah Tahun 2020 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat se-Kecamatan Cidadap mencapai 84,16 dari target 80.5 yang didapat dari rata-rata hasil IKM dari Kecamatan Cidadap dan 3 Kelurahan se-Kecamatan Cidadap dengan nilai :

- a. Kecamatan Cidadap = 84,07
- b. Kelurahan Hegarmanah = 83.16
- c. Kelurahan Ciumbuleuit = 85.65
- d. Kelurahan Ledeng = 83.78

Analisis Pencapaian Kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 adalah sebesar 84,16 dari target Tahun 2020 sebesar 80.5 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kerjanya mengalami kenaikan sebesar 3.66 point yaitu 104.54 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Pencapaian hasil kinerja indikator penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang dimana dapat dilihat dari 9 (sembilan) komponen unsur pelayanan dari masing-masing wilayah kerja Kecamatan dan Kelurahan khususnya yang ada wilayah Kecamatan Cidadap dan Kelurahan yang dibawah koordinasi Kecamatan Cidadap. Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cidadap selama tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Persyaratan Pelayanan sebesar 2,565
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan sebesar 2,664
3. Waktu Penyelesaian Pelayanan sebesar 2,587
4. Keadilan Pelayanan sebesar 2,771
5. Produk/Spesifikasi Jenis Pelayanan sebesar 2,637
6. Kompetensi Pelaksana 2,641
7. Perilaku Pelaksana sebesar 2,625
8. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan sebesar 2,617 dan
9. Sarana dan Prasarana sebesar 2,583.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa unsur/Kecamatan/Kelurahan yang menduduki memenuhi skala prioritas untuk perbaikan adalah Persyaratan Pelayanan yaitu sebesar 2,565. Sedangkan yang harus dipertahankan karena menduduki peringkat tertinggi yaitu Keadilan Pelayanan sebesar 2,771.

Adapun yang mempengaruhi Nilai Terendah dari Unsur Pelayanan yaitu Persyaratan pelayanan adalah :

1. Penjelasan mengenai persyaratan pelayanan yang disampaikan oleh bagian layanan kurang difahami oleh pengguna layanan, sehingga mereka menganggap persyaratan pelayanan terlalu kompleks, padahal persyaratan pelayanan telah disesuaikan dengan persyaratan peraturan yang berlaku.

Adapun Nilai yang tertinggi yaitu Keadilan Pelayanan dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya :

1. Kepuasan dari Penerima layanan akan sikap adil yang diberikan

oleh petugas layanan dalam artian mendahulukan yang pertama datang. Penjelasan yang sama dari petugas layanan untuk setiap masyarakat penerima layanan sehingga mereka merasa puas akan layanan yang diberikan.

d. Kinerja Nyata dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan tahun berjalan rata rata nilai indeks kepuasan masyarakat kecamatan dan kelurahan sebesar 84.16 dari target sebesar 80.5 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 104.54 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Bila kita bandingkan dengan tahun sebelumnya dimana mencapai nilai 82.42 dari target 80 dengan capaian kinerja sebesar 100.52 %, maka mengalami kenaikan sebesar 4.02 %, tapi bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun ini mengalami kenaikan sebesar 1.74 point sehingga kenaikan prosentase menjadi tidak significant dikarenakan target yang ditentukan lebih tinggi dari tahun kemarin.

e. Kinerja Nyata dengan Akhir Renstra

Bila rata rata nilai indeks kepuasan masyarakat kecamatan dan kelurahan kelurahan sebesar 84,16 dari target 80.5 dengan capaian kinerja sebesar 104.54 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 85 maka capaian kinerja sebesar 100,99 %.

f. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Tabel 3.7

Data Perbandingan IKM Per-Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	IKM		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	ANDIR	81,60	83,84	102,75
2	ANTAPANI	80,00	86,08	107,60
3	ARCAMANIK	83,55	83,77	100,26
4	ASTANAANYAR	82,25	82,91	100,80
5	BABAKAN CIPARAY	81,00	82,86	102,30
6	BATUNUNGGAL	83,00	84,30	101,57
7	BANDUNG KIDUL	80,02	86,00	107,47
8	BANDUNG KULON	83,15	83,16	100,01
9	BANDUNG WETAN	82,46	82,66	100,24
10	BUAH BATU	80,00	83,42	104,28
11	BOJONGLOA KALER	83,70	83,83	100,16
12	BOJONGLOA KIDUL	80,20	83,11	103,63
13	CIBEUNYING KALER	86,30	87,67	101,59
14	CIBEUNYING KIDUL	84,34	84,49	100,18
15	CIBIRU	82,21	83,90	102,06
16	CICENDO	85,84	86,27	100,50
17	CIDADAP	80,50	84,16	104,55
18	CINAMBO	82,80	85,81	103,64
19	COBLONG	84,92	87,89	103,50
20	GEDE BAGE	83,55	83,77	100,26
21	KIARACONDONG	82,00	83,23	101,50
22	LENGKONG	82,00	83,02	101,24
23	RANCASARI	81,00	85,74	105,85
24	REGOL	83,50	84,51	101,21
s25	MANDALAJATI	81,00	81,86	101,06
26	SUKASARI	80,00	83,42	104,28
27	SUKAJADI	83,00	83,25	100,30
28	SUMUR BANDUNG	79,00	87,89	111,25
29	UJUNG BERUNG	83,20	85,68	102,98
30	PANYILEUKAN	83,40	84,77	101,64

Grafik
Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
Tahun 2020



Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Cidadap menduduki posisi ke-5 dari 30 Kecamatan se-Kota Bandung terbawah setelah Kecamatan Rancasari dengan prosentase capaian sebesar 105.85% sedangkan capaian IKM tertinggi oleh Kecamatan Sumur Bandung dengan raihan sebesar 111,25% dari target yang telah ditetapkan.

Dengan perbandingan capaian ini maka menjadi pemicu bagi aparat di Kecamatan Cidadap untuk lebih meningkatkan kinerja layanan kepada masyarakat.

g. Faktor Pendukung :

1. Masyarakat lebih peka terhadap informasi baik yang diberikan di loket pelayanan maupun di media masa terkait dengan pelayanan di kecamatan gratis
2. Meningkatnya keahlian / ketrampilan dalam mengelola atau management keuangan dan barang dengan menurunnya jumlah temuan dari tahun sebelumnya

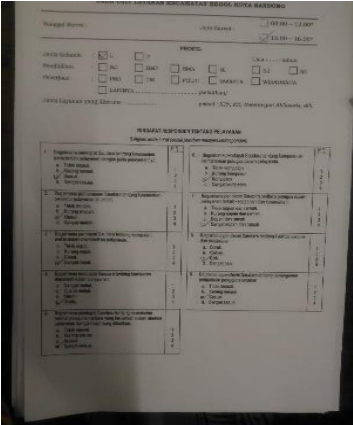
h. Faktor Penghambat :

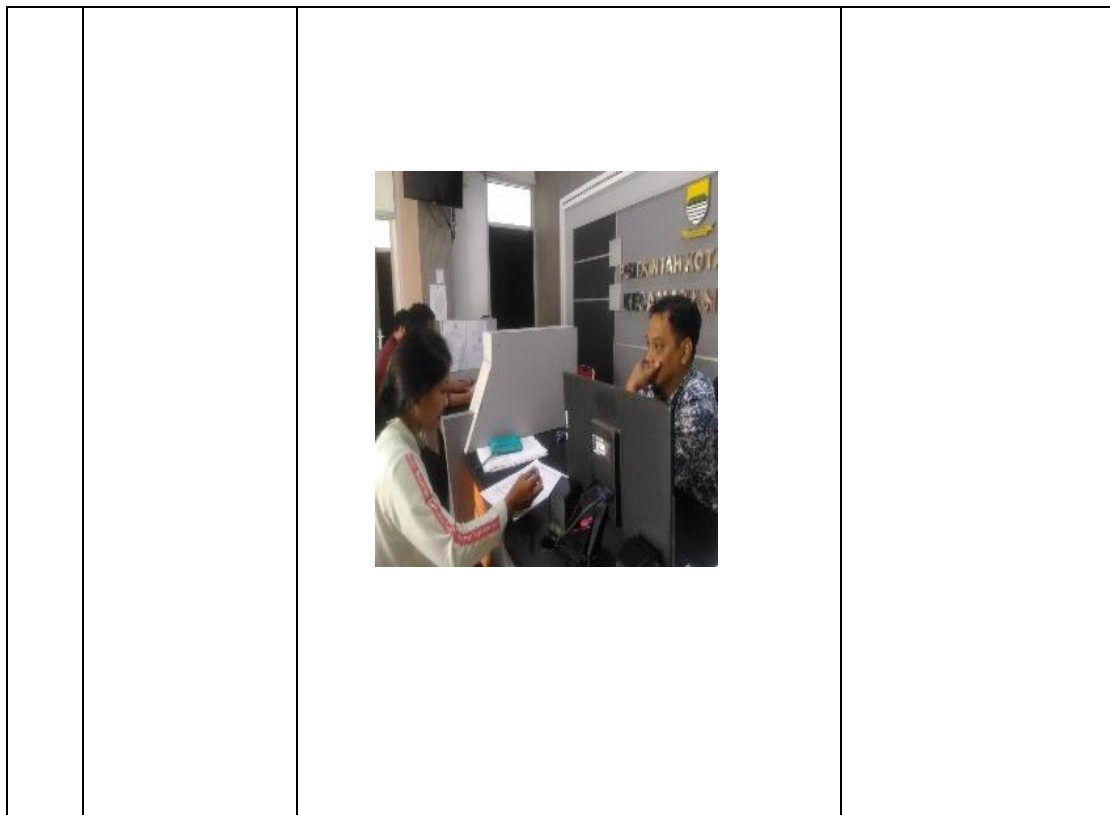
1. Pengawasan terkait keuangan kurang terutama atas transaksi non tunai di Unit Kelurahan, dan kurangnya pengawasan dari Bendahara Pengeluaran terhadap Bendahara Pengeluaran Pembantu.

i. Solusi :

1. Memberikan penjelasan tentang kemudahan layanan kepada masyarakat.
2. Melakukan monev untuk meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan.

Dokumentasi Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

No	INDIKATOR KINERJA	DOKUMENTASI	KETERANGAN
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)



Sasaran 2

Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Keamanan dan kenyamanan Lingkungan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019	Akhir Renstra Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian %		Target	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Prosentase Kelurahan Unggul	%	66.66	66.66	100,00	33.33	100	66.66

Sasaran Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu : "Persentase Kelurahan Unggul" adalah sebesar 66.66 dari target sebesar 66.66 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul" tahun ini adalah sebesar 66.66 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Cidadap maka capaian kinerjanya mencapai 66.66 %.

a. Penjelasan Umum Sasaran Indikator

Kelurahan Unggul merupakan model untuk meningkatkan mutu dan kinerja kelurahan dengan memaksimalkan pembinaan dan keterlibatan dari unsur seksi yang ada ditingkat kecamatan sehingga perkembangannya diharapkan akan lebih cepat terwujud dan terarah dalam mendukung program Pemerintahan Kota Bandung yang pada akhir dapat dijadikan menjadi kelurahan percontohan.

b. Kinerja Nyata Vs Rencana Kerja/Tahun Berjalan

Capaian kinerja nyata Prosentase Kelurahan Unggul adalah sebesar 66.66 % dari target sebesar 66.66 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya target sebesar 100 % sesuai dengan target telah dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

c. Kinerja Nyata dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan tahun berjalan Prosentase Kelurahan Unggul sebesar 66.66 % dari target 66.66% dengan capaian kinerja sebesar 100 %, maka kinerja tahun ini mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan tahun lalu yang mencapai nilai 16,67%, dimana tahun ini ada dua kelurahan yang memenuhi kriteria unggul yaitu Kelurahan Hegarmanah dan Kelurahan Ciumbuleuit.

d. Kinerja Nyata dengan Akhir Renstra

Bila realisasi indikator Prosentase 66.66 % dengan capaian kinerja sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 100 % maka capaian kinerja sebesar 33.33 % dari target akhir renstra 2018-2023 Kecamatan Cidadap.

e. Kinerja Nyata dengan Kinerja Instansi Lain

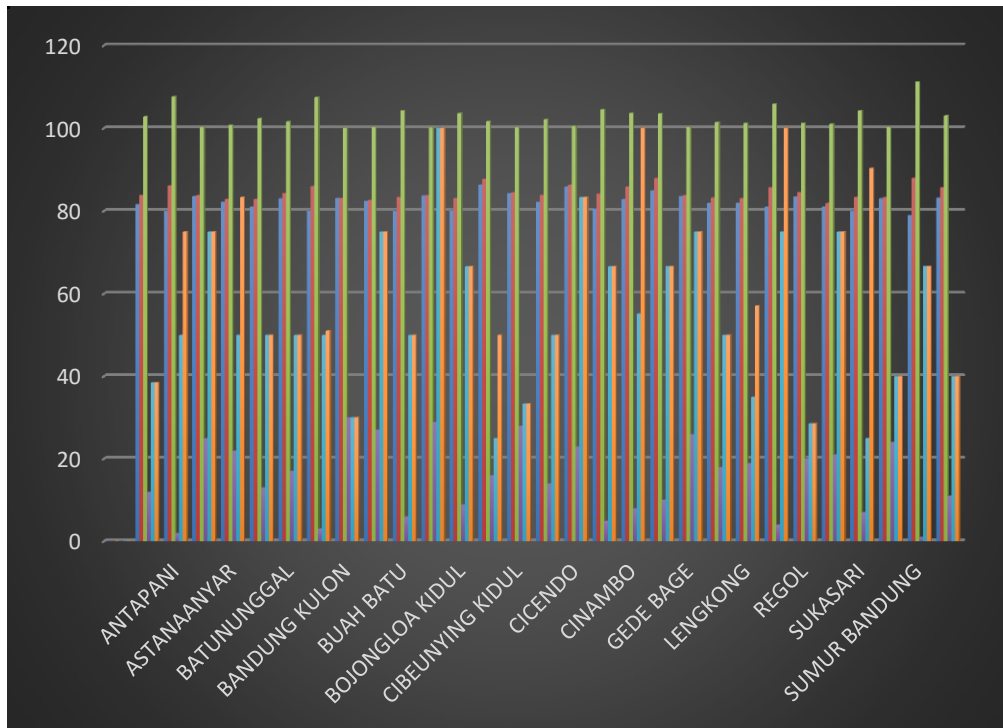
Realisasi dari indikator kedua yaitu Prosentase Kelurahan Unggul sebesar 66.66% dari target 66.66% dengan capaian kinerja sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan 30 Kecamatan se-Kota Bandung dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 3.9
Data Perbandingan Kelurahan Unggul Tahun 2020

NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI KELURAHAN UNGGUL		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	ANDIR	38,46	38,46	100,00
2	ANTAPANI	50,00	75,00	150,00
3	ARCAMANIK	75,00	75,00	100,00
4	ASTANAANYAR	50,00	83,33	166,66
5	BABAKAN CIPARAY	50,00	50,00	100,00
6	BATUNUNGGAL	50,00	50,00	100,00
7	BANDUNG KIDUL	50,00	51,00	102,00
8	BANDUNG KULON	30,00	30,00	100,00
9	BANDUNG WETAN	75,00	75,00	100,00
10	BUAH BATU	50,00	50,00	100,00
11	BOJONGLOA KALER	100,00	100,00	100,00
12	BOJONGLOA KIDUL	66,66	66,66	100,00
13	CIBEUNYING KALER	25,00	50,00	200,00
14	CIBEUNYING KIDUL	33,33	33,33	100,00
15	CIBIRU	50,00	50,00	100,00
16	CICENDO	55,15	100,00	181,32
17	CIDADAP	66,66	66,66	100,00
18	CINAMBO	55,15	100,00	181,32
19	COBLONG	66,67	66,67	100,00
20	GEDE BAGE	75,00	75,00	100,00
21	KIARACONDONG	50,00	50,00	100,00
22	LENGKONG	35,00	57,14	163,26
23	RANCASARI	75,00	100,00	133,33
24	REGOL	28,57	28,57	100,00
25	MANDALAJATI	75,00	75,00	100,00
26	SUKASARI	25,00	90,38	361,52
27	SUKAJADI	40,00	40,00	100,00
28	SUMUR BANDUNG	66,67	66,67	100,00
29	UJUNG BERUNG	40,00	40,00	100,00
30	PANYILEUKAN	100,00	100,00	100,00

Sumber data : Silakip Tahun 2020

GRAFIK
Perbandingan Persentase Kelurahan Unggul Tahun 2020



Pencapaian prosentase kelurahakn unggul untuk semua kecamatan di Kota Bandung semua mencapai target, bahkan untuk beberapa Kecamatan melampaui target yang telah ditentukan seperti untuk Kecamatan Sukasari yang mencapai nilai sebesar 361,52%.

Keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator kinerja Prosentasi Kelurahan Unggul disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

f. Faktor Pendukung :

1. Respon seksi di tingkat kelurahan sangat baik dalam pemenuhan dokumen yang menjadi persyaratan kelurahan unggul;
2. Capaian kinerja nyata untuk akhir renstra telah tercapai.

g. Faktor Penghambat :

Masih Kurangnya pemahaman rancangan indikator kelurahan unggul



h. Solusi :

1. Melakukan sosialisasi rancangan pembentukan kelurahan unggul kepada pejabat struktural kecamatan dan kelurahan.
2. Melakukan perubahan jumlah minimal kriteria untuk mencapai prosentase kelurahan unggul.

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan

No	INDIKATOR KINERJA	DOKUMENTASI	KETERANGAN
1	Persentase Kelurahan Unggul		<p>Penertiban PKL di Jalan Hegarmanah</p>
	Persentase Kelurahan Unggul		<p>Taman dalam kondisi terpeliharaan</p>

	<p>Persentase Kelurahan Unggul</p>		<p>Taman RW dalam Kondisi Terpelihara</p>
	<p>Persentase Kelurahan Unggul</p>		<p>Bank Sampah</p>

Sasaran 3
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 3

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019	Akhir Renstra Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian %		Target	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	65.87	68.48	103.98	-	76.34	98.70

Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" adalah sebesar 68.48% dari target sebesar 65.87% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 103.96 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini meningkat 0.96 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 103.00

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini adalah sebesar 103.96%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Cidadap maka capaian kerjanya mencapai 42.34 %.

a. Penjelasan Umum Sasaran Indikator

Nilai Unsur Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diperoleh dari pengukuran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 3 kelurahan yang ada diwilayah Kecamatan Cidadap.

Nilai tingkat lembaga kemasyarakatan = (% RW Unggul + % PKK Unggul +

% Karang Taruna Unggul + % LPM Unggul) dibagi 4

% RW UNGGUL = Minimal memenuhi salah satu metode Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat dan 50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung

% PKK Unggul = Kriteria PKK Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan PKK untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung

% Karang Unggul = Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan

% LPM Unggul = Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan LPM untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung

b. Kinerja Nyata VS Rencana Kerja / tahun berjalan

Capaian kinerja nyata Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan adalah realisasi sebesar 68.48% dari target sebesar 65.87% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103,96 % atau melebihi target yang diperjanjikan.

Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan = 68,48% , merupakan jumlah rata2 % RW Unggul + % LKK

Unggul dengan rincian kriteria sebagai berikut :

- RW Unggul = 62,32 % sub kegiatan lingkup RW
- PKK Unggul = 70,52 % sub kegiatan lingkup PKK
- Karang Taruna Unggul = 71,73 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna
- LPM unggul = 65,60 % sub kegiatan lingkup LPM

Pada data diatas dapat kita lihat bahwa kriteria yang menduduki memenuhi skala prioritas untuk perbaikan adalah pada RW Unggul karena mempunyai posisi terendah pada penyerapan anggaran Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, sedangkan posisi nilai tertinggi adalah pada Karang Taruna Unggul, untuk lebih jelas kriteria tertinggi dan terendah hasil Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2002 di Kecamatan Cidadap yaitu :

1. Kriteria paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu Karang Taruna Unggul.
2. Kriteria paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada RW Unggul.

Yang mempengaruhi nilai terendah adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk meraih predikat RW Unggul dan LKK Unggul belum dilaksanakan di masing-masing tingkat RW.
2. Masih banyak pengurus RW yang belum mengetahui dan memahami kriteria RW Unggul dan LKK Unggul.
3. Belum Banyak kegiatan yang mendukung program kerja Walikota dan RJPMD Kota Bandung, hal ini dikarenakan anggaran untuk tingkat pemberdayaan ini mengalami rasionalisasi yang digunakan untuk kegiatan penanganan pandemic covid-19.

c. Kinerja Nyata dengan Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja nyata indikator tingkat pemberdayaan lembaga masyarakat yang memiliki realisasi sebesar 68.48% dari target 65.87 % % bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dengan capaian kinerja sebesar 50.63 % maka capaian mengalami kenaikan sebesar 17.85 %.

d. Kinerja Nyata dengan Akhir Renstra

Bila capaian kinerja nyata tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang realisasi sebesar 68.48% dari target sebesar 65.87 % dengan capaian 103,96 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan dari target akhir renstra 88.73 % maka perlu adanya peningkatan perencanaan untuk target Tingkat pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan pada tahun 2021.

e. Kinerja Nyata dengan Kinerja Instansi Lain

Untuk capaian tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tahun 2020 dibandingkan dengan OPD lain (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi dapat terlihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut :

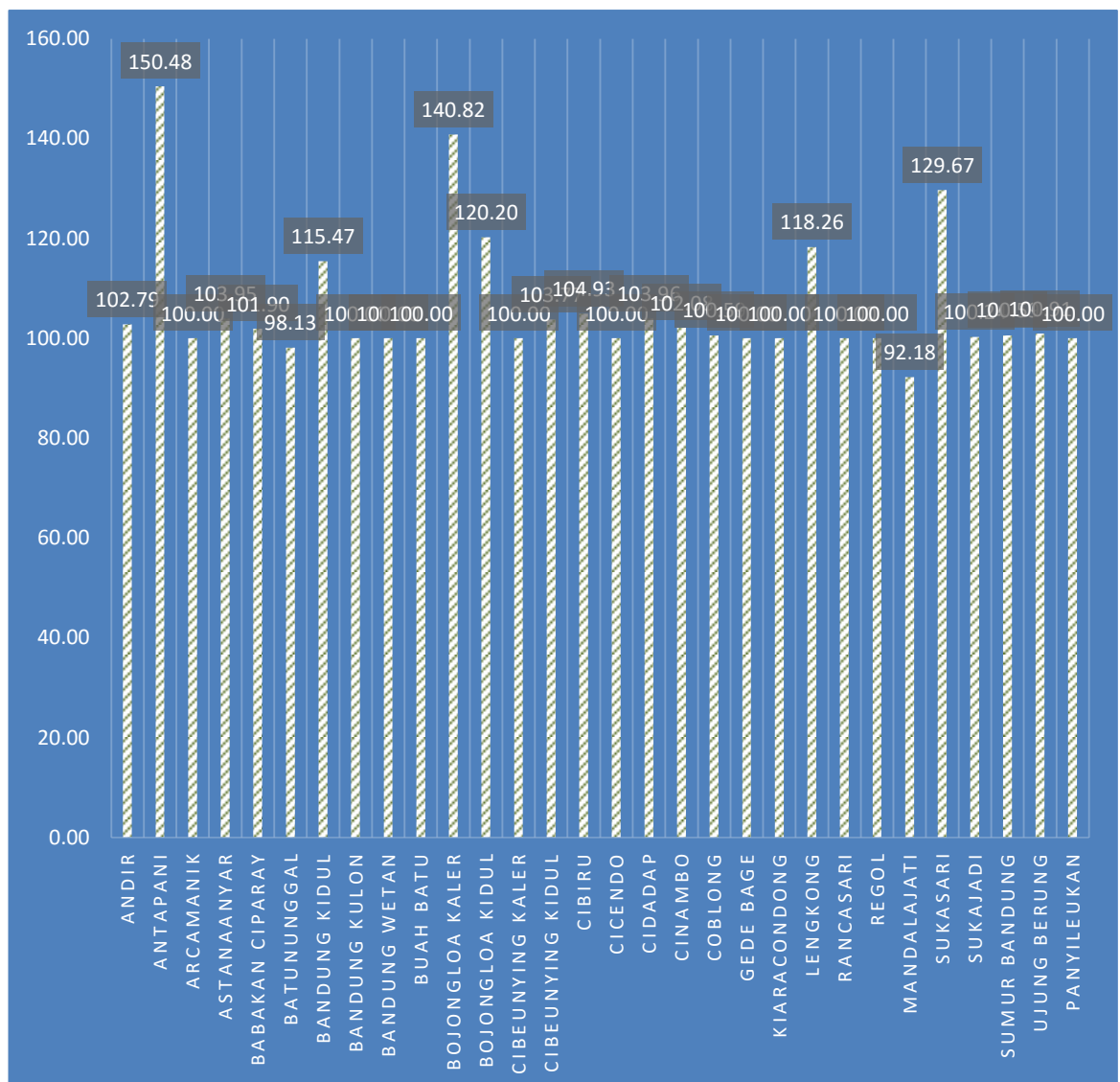
Tabel 3.11
Data Perbandingan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Masyarakat

NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI		
		TPLK		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	ANDIR	56,36	57,93	102,79
2	ANTAPANI	50,00	75,24	150,48
3	ARCAMANIK	63,68	63,68	100,00
4	ASTANAANYAR	59,00	61,33	103,95
5	BABAKAN CIPARAY	79,00	80,50	101,90
6	BATUNUNGGAL	70,00	68,69	98,13
7	BANDUNG KIDUL	60,00	69,28	115,47
8	BANDUNG KULON	83,50	83,50	100,00
9	BANDUNG WETAN	57,22	57,22	100,00
10	BUAH BATU	61,85	61,85	100,00
11	BOJONGLOA KALER	50,00	70,41	140,82
12	BOJONGLOA KIDUL	50,00	60,10	120,20
13	CIBEUNYING KALER	15,98	15,98	100,00
14	CIBEUNYING KIDUL	44,86	46,55	103,77
15	CIBIRU	75,00	78,70	104,93

16	CICENDO	82,50	84,22	102,08
17	CIDADAP	65,87	68,48	103,96
18	CINAMBO	82,50	84,22	102,08
19	COBLONG	92,04	92,58	100,59
20	GEDE BAGE	63,68	63,68	100,00
21	KIARACONDONG	42,56	42,56	100,00
22	LENGKONG	50,00	59,13	118,26
23	RANCASARI	76,00	76,00	100,00
24	REGOL	36,17	36,17	100,00
25	MANDALAJATI	77,00	70,98	92,18
26	SUKASARI	75,00	97,25	129,67
27	SUKAJADI	78,14	78,33	100,24
28	SUMUR BANDUNG	92,04	92,58	100,59
29	UJUNG BERUNG	60,61	61,16	100,91
30	PANYILEUKAN	35,31	35,31	100,00

Sumber Data : SILAKIP Tahun 2020

Perbandingan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Tahun 2020



Bila melihat tabel untuk capaian tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dibandingkan dengan kecamatan lain bervariasi sehingga tidak dapat dibandingkan dikarenakan :

- ❖ Banyaknya RW dan kelurahan dari masing masing kecamatan.
- ❖ Target dari tiap kecamatan cukup bervariasi disesuaikan dengan jumlah anggaran yang mendukung RPJMD.

Keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator tingkat pemberdayaan masyarakat disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

f. Faktor Pendukung :

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA
2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung
3. Adanya keselarasan antara Program dan kegiatan dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Cidadap
4. Respon masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kelurahan ditanggapi dengan cukup baik.

g. Faktor Penghambat :

1. Terjadinya pergeseran anggaran yang mendukung RPJMD untuk kegiatan penanganan covid-19.
2. Lebih memantapkan perencanaan sehingga meminimalisir kesalahan dan disesuaikan dengan RPJMD dan janji walikota,

h. Solusi :

Untuk meningkatkan capaian indikator tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas. maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi/rencana aksi pada tahun berikut adalah :

1. Melakukan pemahaman bersama terkait kriteria dan pemahaman istilah yang terkait dengan perencanaan
2. Dapat lebih mengarahkan kembali kepada pejabat struktural baik di kecamatan maupun di kelurahan dalam membuat

perencanaan anggaran yang dapat mendukung pencapaian IKI dan mendukung tercapainya RPJMD.

3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN CAPAIAN SASARAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran di Kecamatan Cidadap didukung oleh Program-Program sebagai berikut:

Tabel 3.12
Program Capaian Kinerja Kecamatan Cidadap

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya (jasa komunikasi. sumber daya air. kebutuhan listrik dan internet). jasa kebersihan kantor. jasa perbaikan peralatan kerja. Alat Tulis Kantor (ATK). barang cetakan dan penggandaan. peralatan dan perlengkapan kantor. Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan. makanan dan minuman dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Gedung Kantor yang memadai. Kendaraan dinas operasional yang memadai. Terpeliharanya gedung kantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur(program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah meningkatnya kemampuan/kapasitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.
4.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sarana Fasilitas Umum	Output program beserta kegiatan didalamnya antara lain Simpul Space Kecamatan berupa Rumah Sehat. Satu Taman Satu Komunitas. Satu Kampung Satu Taman. . Pasukan Gorong Gorong.
5.	Program Pengadministrasian Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Output program beserta kegiatan didalamnya antara lain pemberian Honor RW RT (termasuk pembinaan RW RT). (termasuk operasional Pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan)

6.	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Output program beserta kegiatan didalamnya antara lain Penanganan Pasar Tumpah. Satpol PP Kecamatan. Forum PKL. Media Brosur Tertib
----	---	--

Tabel. 3.13
Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2020
1	2	3
Sasaran 1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cidadap	
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Cidadap	74.788.010,00
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kecamatan Cidadap	9.250.000,00
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Cidadap	112.912.800,00
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kecamatan Cidadap	9.850.000,00
1.5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Cidadap	18.924.200,00
1.6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Cidadap	20.636.000,00
1.7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Cidadap	4.991.600,00
1.8	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Cidadap	18.856.640,00
1.9	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan Cidadap	14.239.500,00
1.1	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Cidadap	9.376.000,00
1.11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Cidadap	34.439.000,00
1.12	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kecamatan Cidadap	95.231.000,00
1.13	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran Kecamatan Cidadap	307.074.000,00
1.14	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Hegarmanah	15.135.000,00
1.16	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Hegarmanah	600.000,00
1.17	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kelurahan Hegarmanah	2.900.000,00
1.18	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Hegarmanah	

			5.161.100,00
	1.19	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Hegarmanah	2.600.000,00
	1.2	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Hegarmanah	613.200,00
	1.21	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Hegarmanah	28.814.800,00
	1.22	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Hegarmanah	1.492.800,00
	1.23	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Hegarmanah	7.678.400,00
	1.24	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Ciumbuleuit	15.784.380,00
	1.26	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Ciumbuleuit	660.000,00
	1.27	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kelurahan Ciumbuleuit	2.500.000,00
	1.28	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Ciumbuleuit	4.995.100,00
	1.29	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Ciumbuleuit	2.500.000,00
	1.3	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Ciumbuleuit	1.496.200,00
	1.31	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Ciumbuleuit	12.288.500,00
	1.32	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Ciumbuleuit	1.993.900,00
	1.33	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kelurahan Ciumbuleuit	3.036.000,00
	1.34	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Ciumbuleuit	11.300.000,00
	1.35	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Ledeng	21.999.500,00
	1.37	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Ledeng	600.000,00
	1.39	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Ledeng	4.979.400,00
	1.4	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Ledeng	2.638.640,00
	1.41	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Ledeng	1.013.800,00

	1.42	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Ledeng	13.087.690,00
	1.43	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Ledeng	3.856.000,00
	1.44	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kelurahan Ledeng	2.640.000,00
	1.45	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Ledeng	8.076.000,00
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		
	2.7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kecamatan Cidadap	505.694.000,00
	2.14	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Cidadap	84.242.990,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur		
	3.1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	33.015.000,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur		
	4.1	Kegiatan Pembinaan kinerja Aparatur Kecamatan Cidadap	73.185.200,00
5	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum		
	5.1	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan Kelurahan Hegarmanah	274.939.500,00
	5.2	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan Kelurahan Ciumbuleuit	228.680.000,00
	5.3	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan Kelurahan Ledeng	210.000.000,00
	5.8	Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan	56.793.000,00
	5.9	Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan Kecamatan Cidadap	29.502.000,00
6	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan		
	6.1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan Kecamatan Cidadap	99.260.000,00
	6.2	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan Kelurahan Ledeng	7.075.000,00
	6.5	Kegiatan Pembinaan RT RW Kelurahan Ciumbuleuit	352.950.000,00
	6.6	Kegiatan Pembinaan RT RW Kelurahan Ledeng	153.600.000,00
	6.11	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan Kelurahan Hegarmanah	307.925.000,00

	6.12	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan Kelurahan Ciumbuleuit	5.090.000,00
Total Per Sasaran			
Sasaran 2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan		
7	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan		
	7.1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM Kecamatan Cidadap	25.095.300,00
	7.2	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM Kelurahan Ledeng	4.986.000,00
	7.3	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Kecamatan Cidadap	397.891.000,00
	7.4	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Kelurahan Hegarmanah	109.450.000,00
	7.5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Kelurahan Ciumbuleuit	95.700.000,00
	7.6	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Kelurahan Ledeng	60.000.000,00
	7.11	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Cidadap	413.610.000,00
	7.12	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial Kecamatan Cidadap	72.712.000,00
	7.13	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial Kelurahan Hegarmanah	60.054.400,00
	7.14	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial Kelurahan Ciumbuleuit	71.496.400,00
	7.15	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial Kelurahan Ledeng	48.527.800,00
	7.2	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kewilayahan Kecamatan Cidadap	37.510.000,00
	7.21	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kewilayahan Kelurahan Hegarmanah	5.550.000,00
	7.22	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kewilayahan Kelurahan Ciumbuleuit	5.590.100,00
	7.23	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kewilayahan Kelurahan Ledeng	7.461.500,00
8	Program Perlindungan Sosial Bencana		
	8.2	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Kelurahan Hegarmanah	709.250.000,00

	8.3	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Kelurahan Ciumbuleuit	699.350.000,00
	8.4	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Kelurahan Ledeng	506.750.000,00
Total Per Sasaran			
Sasaran 3			
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat			
	9	Program Pemberdayaan Kewilayahan	
	9.1	Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW Kelurahan Hegarmanah	548.827.434,56
	9.2	Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK Kelurahan Hegarmanah	50.000.000,00
	9.3	Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna Kelurahan Hegarmanah	50.014.200,00
	9.4	Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM Kelurahan Hegarmanah	48.353.000,00
	9.5	Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW Kelurahan Ciumbuleuit	550.018.280,00
	9.6	Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK Kelurahan Ciumbuleuit	59.123.400,00
	9.7	Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna Kelurahan Ciumbuleuit	48.565.200,00
	9.8	Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM Kelurahan Ciumbuleuit	49.999.750,00
	9.9	Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW Kelurahan Ledeng	270.788.900,00
	9.1	Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK Kelurahan Ledeng	47.603.500,00
	9.11	Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna Kelurahan Ledeng	50.083.000,00
	9.12	Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM Kelurahan Ledeng	49.639.020,00
Total Per Sasaran			

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. **14.809.790.234,00** atau mencapai **90.44** % dari alokasi anggaran sebesar Rp **16.373.545.678,21**.

Adapun untuk realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran
Kantor Kecamatan Cidadap Tahun Anggaran 2020

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Belanja Operasi	15.151.812.980,94	13.807.495.974,00	91.13
	Belanja Pegawai	8.226.427.243,65	7.378.675.319,00	89.69
	Belanja Barang dan Jasa	6.925.385.737,29	6.428.820.655,00	92.83
2	Belanja Modal	1.221.732.697,27	1.002.294.260,00	82.04
	Peralatan dan Mesin	247.654.060,00	224.730.000,00	90.74
	Gedung dan Bangunan	174.875.087,27	171.028.000,00	97.80
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	799.203.550,00	606.536.260,00	75.89
	Total	16.373.545.678,21	14.809.790.234,00	90.45

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Kecamatan Cidadap Kota Bandung pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14

**Rencana dan Realisasi Anggaran
Kecamatan Cidadap tahun 2020**

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cidadap	5.027.867.550,00	4.658.218.745,00	92.64
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.423.108.500,00	1.149.811.000,00	80.79
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	1.823.015.684,56	1.623.085.170,00	89.03
	Jumlah	16.373.545.678,21	14.809.790.234,00	90.45

Tabel. 3.15

**Rencana dan Realisasi Kinerja
Kecamatan Cidadap Tahun 2020**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cidadap	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cidadap	80.5	84.16	104.54
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	100	100	100.00
		Rata Rata			
2	Meningkatnya peran kelembagaan,	Persentase Kelurahan Unggul	66.66	66.66	100

	masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan				
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	65.67	68.48	103.68
Rata Rata Capaian Sasaran					150.13

Untuk mengetahui sejauh mana efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yang digunakan per sasaran pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16

Tingkat Efisiensi Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja
Kecamatan Cidadap Tahun 2020

No	Sasaran	% Kinerja	% Capaian Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=3-4
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cidadap	102.27	92.64	9.63
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	100	80.79	19.21
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	103.68	89.03	14.65
Rata – Rata Efisiensi		101.98	87.48	14.49

Secara umum efisiensi anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Cidadap Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efisien terhadap capaian sasaran kinerja.

Dengan rata-rata persentase efisiensi anggaran terhadap pagu indikatif Renstra sebesar 14.49% maka secara umum efisiensi anggaran terhadap

capaian sasaran Kecamatan Cidadap Kota Bandung. dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan **efisien** terhadap capaian kinerja misi organisasi

Tabel 3.17
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Kecamatan Cidadap Tahun 2020

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Sasaran 1,	2	102,27	4.658.218.745,00	92.64
1	Melebihi/Melampaui Target	1	104.54		
2	Sesuai Target	1	100.00		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
Tingkat Efektifitas Kinerja					92.64 %
B.	Sasaran 2,	1	100	1.149.811.000,00	80.79 %
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100		
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
Tingkat Efektifitas Kinerja					80.79 %
C.	Sasaran 3,	1	103.68	1.623.085.170,00	89.03 %
1	Melebihi/Melampaui Target	1	103.68		
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
Tingkat Efektifitas Kinerja					89.03 %

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Cidadap Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian sasaran kinerja.

Dengan rata-rata persentase realisasi anggaran terhadap pagu indikatif Renstra maka secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran

Kecamatan Cidadap Kota Bandung. dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan **efektif** terhadap capaian kinerja misi organisasi.

3.3 Informasi Tambahan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cidadap Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Cidadap Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 2 (Dua) tahun tersebut, sebagai berikut :

Tabel 3.18

Daftar Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh oleh
Kecamatan Cidadap

No.	Tahun	Juara	Tingkat	Keterangan
1.	2017	III	Kota Bandung	Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja
2.	2017	Harapan I	Kota Bandung	Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan
3.	2017	I	Kota Bandung	Lomba 10 Program Pokok PKK
4.	2017	I	Kota Bandung	Lomba Rempug Warga RW
5.	2017	III	Kota Bandung	Lomba Karang Taruna Berprestasi
6.	2018	II	Kota Bandung	Lomba Posyandu diwakili oleh Kelurahan Ciumbuleuit, Posyandu Permata Hati 1 RW.06
7.	2018	I	Kota Bandung	Juara PIK Remaja Gerdap
8.	2018	II	Kota Bandung	Juara Pardus Mars PSM
9.	2018	I	Provinsi	Juara Pola Asuh Anak dan remaja (PAAR), diwakili oleh Kelurahan Ledeng
10.	2018	II	Provinsi	Juara Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), diwakili oleh Kelurahan Ledeng
11.	2018	III	Kota Bandung	Lomba Rebana TP PKK
12.	2018	I	Kota Bandung	Lomba BKMM
13.	2019	II	Kota Bandung	Lomba Olahan Daging Domba

14.	2019	I	Kota Bandung	Lomba Kampung KB
15.	2019	I	Kota Bandung	Lomba Koperasi
16.	2019	I	Kota Bandung	Lomba UPPKS

BAB IV

PENUTUP

Laporan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2020. Pembuatan Laporan ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Cidadap Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dengan tersusunnya Laporan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2020 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Cidadap Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 5 Januari 2021

CAMAT CIDADAP,

Drs. HILDA HENDRAWAN
Pembina Tk.I
NIP. 196711101988011002

LAMPIRAN –LAMPIRAN (EVIDENCE)

LAMPIRAN 1
(IKM)

LAMPIRAN 2

KELURAHAN UNGGUL

LAMPIRAN 3

PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT